



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
KPPD DIY DI KAB. SLEMAN**

Jalan Magelang KM 12,5 Krapyak Triharjo Sleman Telp. (0274) 868563, Fax (0274) 867963  
Email : [samsatsleman@yahoo.co.id](mailto:samsatsleman@yahoo.co.id), [kauptd\\_kppdsleman@jogjaprovo.go.id](mailto:kauptd_kppdsleman@jogjaprovo.go.id). Kode pos - 55514

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN SLEMAN**

**NOMOR : 973 / 00960**

**T E N T A N G**

**DAFTAR IDENTIFIKASI RISIKO  
DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa telah diterbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. bahwa dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman, perlu dilakukan upaya pengendalian secara intensif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman tentang Daftar Identifikasi Risiko di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) ;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 100 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY ;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 143).

MEMUTUSKAN : ....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman terhadap Daftar Identifikasi Risiko di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman.
- Kedua : Daftar Identifikasi Risiko di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman Tahun 2020 sebagaimana pada lampiran 1 Keputusan ini.
- Ketiga : Daftar Risiko sebagaimana pada Diktum Kedua, secara periodik akan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan pengendalian yang terjadi.
- Keempat : Daftar Risiko menjadi alat pengendalian internal bagi seluruh unsur manajemen.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S l e m a n  
Pada Tanggal : 26 Februari 2020

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY  
DI KABUPATEN SLEMAN ,



YB. INDRASWARI WIJAYA. SH  
NIP-19630623 198912 2 002